



SIARAN PERS

Otorita Ibu Kota Nusantara

Nomor: 164/sipers/sdmhumas-oikn/05/2024

14 Mei 2024

Finalisasi Dokumen VLR, Bambang Susantono: VLR SDGs IKN 2024 Akan Menjadi Peta Jalan Solusi Konkret SDGs dan Gambaran Baseline Area IKN

NUSANTARA - Rencana Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mewujudkan kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan melalui penyiapan dokumen Voluntary Local Review Sustainable Development Goals (VLR SDGs) IKN telah memasuki tahap akhir. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, menyambut baik adanya finalisasi pembuatan dan pembahasan tentang VLR SDGs di IKN tahun 2024 oleh Otorita IKN. Hal ini diungkapkan Bambang saat mengikuti konsultasi publik yang berlangsung pada hari Selasa (14/05/2024) di Balai Desa Argomulyo, Penajam Paser Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 600 orang, baik secara luring maupun daring, yang berasal dari unsur masyarakat lokal, perguruan tinggi, filantropi, pemerintah daerah Kalimantan Timur, kabupaten, kecamatan, kelompok difabel, perempuan, karang taruna, dan adat.

“VLR IKN adalah salah satu instrumen untuk menyebarluaskan laporan pencapaian SDGs IKN dan dampak ke depan baik untuk IKN maupun wilayah sekitarnya ke khalayak yang lebih luas (internasional),” ujar Bambang Susantono.

Selain untuk menyebarluaskan laporan pencapaian, Bambang juga menambahkan, VLR akan berfungsi menjadi semacam informasi awal (*baseline*) bagi pelaksanaan SDGs pada implementasi pembangunan IKN.

“Sebagai wilayah yang baru dibangun, penyusunan VLR ini menjadi unik, dan tentunya membutuhkan perspektif yang berbeda, karena selain akan menunjukkan komitmen Otorita IKN terhadap SDGs pada proses pembangunannya, namun juga bagaimana menjamin komitmen ini akan dijalankan secara konsisten,” ungkap Bambang.

“VLR akan menggambarkan bagaimana kondisi baseline wilayah dalam area IKN yang membandingkan dengan dan tanpa adanya IKN,” tambahnya.

Lebih lanjut Bambang Susantono mengatakan, dalam proses perencanaan pembangunannya, Otorita IKN telah melokalisasi SDGs, dengan menggunakan Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Junto Perpres 111 tahun 2022, sebagai dasar penyusunan Rencana Induk IKN.

“Berdasarkan hal ini, Otorita IKN berinisiatif untuk menyusun laporan VLR, berdasarkan perencanaan dan proses sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara,” lanjut Bambang.

Sejumlah manfaat-manfaat terkait disusunnya VLR SDGs IKN juga diutarakan Bambang, antara lain: VLR menerjemahkan SDGs menjadi solusi konkret ; VLR melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan partisipatif ; VLR memupuk dialog dengan realitas wilayah di tingkat internasional dan membantu menjadi bagian dari gerakan global untuk melokalkan SDGs ; VLR merupakan titik awal untuk proses pemantauan lokal untuk SDGs ; VLR memperkenalkan potensi dan kemajuan daerah ke kancah internasional (Ajang Promosi Daerah) dan VLR membuka peluang kemitraan baru di level global.

“Dengan demikian, penyusunan VLR diharapkan dapat meningkatkan inisiatif lokal dalam pelaksanaan SDGs, terutama dalam menyelesaikan gap yang masih ada, dan mempermudah implementasi program yang berkelanjutan” kata Bambang Susantono.



Sementara itu Gita Shabarwal selaku Kepala Perwakilan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk Indonesia mengemukakan, dirinya menyoroti tiga aspek yang ada dalam VLR yang dibuat oleh Otorita IKN.

“Pertama, Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan mendorong investasi infrastruktur di seluruh kabupaten. Kedua, Nusantara bertujuan untuk menjadi “kota hutan lestari” dengan 65% hutan tropis dipulihkan di wilayah ibu kota dan Ketiga, VLR merekomendasikan untuk memperkuat kesetaraan gender sambil memprioritaskan inklusi sosial untuk memastikan perempuan, penyandang disabilitas, generasi muda dan lansia mendapatkan manfaat dari program pembangunan, termasuk kota ramah anak,” imbuh Gita Shabarwal.

Gita Shabarwal juga menyebut, ada 13 Badan PBB termasuk ESCAP, UNDP, UNIDO, UNHABITAT, dan UNICEF akan terus menggunakan keahlian mereka untuk mendukung transformasi hijau di Ibu Kota Nusantara.

Diani Sadiawati, Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN menjelaskan peran VLR SDGs IKN Tahun 2024 dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat lokal yang akan menghuni IKN nantinya.

“Dokumen ini menjadi peta jalan komitmen awal Otorita IKN untuk menjaga kelestarian alam, memberdayakan masyarakat, dan biodiversitas. Oleh karena itu, masukan dan konfirmasi akan data dan informasi dari stakeholder dan masyarakat lokal sangat penting untuk membentuk dokumen VLR yang sempurna dan menjadi aksi jalan yang tepat sasaran,” ucap Diani.

Draft final VLR SDGs IKN sebelumnya telah selesai disusun dengan dukungan dari UNESCAP, ADB dan UNDP dan dibantu oleh konsultan dari SDGs Center Universitas Padjadjaran dan Universitas Mulawarman.

Dokumen ini tidak hanya mewakili sebuah langkah menuju tujuan ambisius Indonesia untuk membangun kota berkelanjutan pada tahun 2045, namun juga sebuah lompatan dalam perjalanan untuk mengintegrasikan Nusantara ke dalam upaya global untuk mencapai SDGs yang digariskan dalam Agenda 2030.

Biro SDM dan Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

Kontak:

halo@ikn.go.id / humas@ikn.go.id

Website : ikn.go.id
Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)
Twitter : twitter.com/ikn_id
Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua
#Nusantara
#IbuKotaNegara

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh



NUSANTARA

SIARAN PERS

Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Otorita IKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

DOKUMENTASI FOTO
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara



